

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Negara Hukum

A.1 Pengertian Negara Hukum

Pemikiran tentang Negara Hukum sudah cukup tua, latar belakang kemunculannya pun merupakan reaksi rakyat terhadap kesewenang-wenang penguasa pada masa lampau, secara historis konsep Negara Hukum menurut konsep Eropa continental yang dinamakan *Rech staat*, Negara hukum menurut konsep Anglo saxon (*rule of law*), konsep *social legality* dan konsep Negara Hukum Pancasila.¹⁵

Cita Negara Hukum untuk Pertama kalinya di kemukakan oleh plato dan di pertegas Oleh Aristoteles, Menurut Plato Penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan Hukum. menurut Aristoteles yang memerintahkan dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.¹⁶

Konsepsi Negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan Negara-Negara kontroversial dengan negara kekuasaan (negara dengan pemerintahan yang absolut) pada hakikatnya merupakan hasil dari perdebatan

¹⁵Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta 2000 hlm.63

¹⁶ Nukthoh, Arfawie kurde, *Telaah kritis Teori negara hukum*, 2005. Pustaka pelajar, Yogyakarta. hlm.14

yang terus menerus selama berabad-abad dari sarjana dan ahli filsafat tentang negara dan hukum.¹⁷

Pengertian Negara hukum di atas merumuskan definisi dari beberapa para ahli hukum dan sumber seperti, dalam *Ensiklopedia Indoensia*, istilah

Negara Hukum disebut (*Recht staat*) sedangkan Negara kekuasaan disebut dengan (*Macht staat*) negara Hukum adalah Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yakni tata tertib yang umunya berdasarkan hukum.

Negara hukum menurut F.R Bothing adalah: kekuasaan pemegang kekuasaan yang di batasai oleh hukum, lebih lanjut di sebut bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka di wujudkan dengan cara pembuatan undang-undang.¹⁸

Dalam perkembangan, terdapat korelasi yang jelas antara Negara hukum yang bertumpuh pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang di jalankan melalui sistem demokrasi. dengan kata lain Negara harus di topang dengan sistem demokrasi. demokrasi merupakan cara mempertahankan kontrol atas negara hukum.¹⁹

Soepomo dalam bukunya *Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia* “menyebutkan istilah negara Hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat : antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.²⁰ Negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat dan the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau

¹⁷ Muktie Fajdjar, *Tipe-Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Malang 2004 hlm. 10-11

¹⁸ Ridwal H.R. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta 2003. hlm 7

¹⁹ *Ibid* Hlm. 12

²⁰ Soepomo, *Undang-Undang Republik Indoensia*. Noordhof. Jakarta hlm 21

pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*).²¹ maka dengan demikian tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan Penyalahgunaan kekuasaan baik Negara yang berbentuk kerajaan atau Republik semua Tunduk Pada Ketentuan Hukum yang berlaku.

Aristoteles Berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah Negara yang di perintahkan dengan konstitusi. menurutnya ada tiga unsur dalam sistem pemerintahan yang berkonstitusi, yakni *pertama*. pemerintah di laksanakan untuk kepentingan umum. *kedua*. Pemerintah di laksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan umum, bukan hukum yang di buat secara kesewenang-wenangan di tafsirkan sesuai kehendak sendiri yang menyimpang dari konstitusi. *Ketiga*. pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang di laksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan.²²

Pemikiran Negara Hukum sudah ada jauh sebelum terjadi Revolusi di Inggris pada Tahun 1668, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Negara Hukum pertama sekali di kemukakan oleh Plato lalu kemudian di pertegas oleh Aristoteles. menurut Plato penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah di atur oleh hukum selanjutnya konsep tersebut di pertegas oleh Aristoteles dengan menyatakan bahwa negara yang baik adalah Negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. dalam perkembangan Negara Hukum di bagi ke dalam empat bagian yaitu Negara polis, Negara hukum liberal, Negara Hukum Formal dan Negara Hukum materiil²³

²¹ Bagir Manan, *lembaga Kepresidenan*. FH UII Press, Jakarta. 2003 hlm. 11

²² Aristoteles, *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua, Visimedia, Jakarta, 2008, hal 48

²³ Nikmatul Huda. "Negara Hukum demokrasi dan Judicial Review", 2005. UII Press, Yogyakarta, hlm 1-8

Negara Hukum Polis:Negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian,pada tipe ini Negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain,Negara jaga malam.pemerintah dalam negara ini bersifat monarki absolut.kepentingan umum itu berdasarkan kehendak raja,menurut Negara Polis ini segala sesuatu di tentukan oleh raja dan rakyat tidak mempunyai hak terhadap raja.²⁴

Negara hukum liberal merupakan reaksi terhadap konsep negara Polis dimana pada saat itu Negara bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat,konsep Negara ini di pelopori oleh Imanuel kant.dalam kosnep Negara Hukum liberal ini menghendaki Negara tidak turut ikut campur dalam penyelenggraan ekonomi,sedangkan penjaga tata tertib di serahkan kepada Negara.²⁵

Negara Hukum Formal ialah Negara hukum yang dapat pengesahan dari rakyat,segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu,harus berdasarkan Undang-Undang Negara Hukum formal ini disebut Negara demokrasi yang berlandaskan Hukum.²⁶

Negara Hukum materiil merupakan perkembangan dari negara hukum formal,berdasarkan hukum materil tindakan penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya di benarkan atau berlakunya asas oportunitas.²⁷

²⁴ *Ibid.* hlm.2-3

²⁵ *Ibid.* hlm.4

²⁶ *Ibid.* hlm.6

²⁷ *Ibid.* hlm 7

A.2. Indonesia Negara Hukum

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 1 ayat 3,hal ini menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia Tidak Berdasarkan Pada kekuasaan belaka (*machstaats*).dalam konsep Negara Hukum idealnya bahwa yang menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah Hukum.bukan politik atau ekonomi.istilah yang di katakana A.V.Dicey Konsep “*The Rule of law,and Not of man*“.²⁸ hal ini berarti bahwa yang di anggap pemimpin yang sesungguhnya adalah hukum itu sendiri,mengingat jabatan Presiden merupakan mandat dari rakyat yang dapat di duduki oleh orang perorangan secara silih berganti sesuai periode yang di tentukan maka pemimpin yang sesungguhnya hanyalah Hukum.²⁹dalam mewujudkan cita Hukum tersebut bahwa hubungan negara dengan hukum merupakan hubunga timbal balik yang saling berkaitan dan saling mengisi.hal ini di dasarkan pada pemikiran bahwa kekuasaan negara tanpa Hukum,Tidak memiliki kewibawaan sedangkan hukum tanpa sanksi akan sulit di tegakan.dalam hubungan tersebut hukum melegitimasi negara sedangkan negara menciptakan menegaskan dan menegakan hukum.³⁰

Konsepsi Negara hukum yang hendak di wujudkan Indonesia adalah sistem hukum Pancasila.yang pada dasarnya di pengaruhi oleh dua sistem hukum yang

²⁸Jimly Asshiddiqie,*Pokok-PokoK Hukum Tata Negara Indonesia*,Bhuana Imu Populer.Jakarta 2008 hlm 302

²⁹*Ibit.*

³⁰ Krisna Harahap,*Konstitusi Republik Indonesia menuju perubahan ke-5*, Grafika Budi utami.Jakarta 2008 Hlm 302

berkembang sistem hukum yang di dasarkan sesuai dengan Pancasila.³¹ konsep hukum tersebut ialah konsep hukum Eropa kontinental serta konsep hukum Anglo Saxon *the rule of the law*. Penerapan dua sistem konsep hukum ini di sebabkan karena pesatnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat yang menghendaki penerapan hukum yang mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.³²

Menurut Fredrick Julius Stahl, Unsur Negara Hukum itu mencakup empat elemen penting

- a) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b) Pembagian kekuasaan (*distribution of power*)
- c) Pemerintah berdasarkan undang-undang
- d) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan menurut A.v Dicey dari kalangan ahli Hukum Anglo Saxon memberi ciri-ciri *The rule of law*. sebagai berikut :

- a.) Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh di hukum jika melanggar hukum
- b.) Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat yang bisa maupun bagi pejabat.

Menurut Mahfud M.D. "bahwa Indonesia mengambil konsep Prismatic atau integratif dari konsepsi Negara Hukum. bahwa menurut Mahfud M.D. "bahwa sistem Hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang menghendaki keadilan substantial melalui aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya keadilan substantial³³

Menurut Prof Jimly Asshiddiqie, terdapat 13 Prinsip Negara Hukum Indonesia yang merupakan perpaduan Konsep *rechtsaats* dan *the Rule of law*. sebagai berikut :³⁴

- a.) Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- b.) Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*)
- c.) Asas Legalitas (*due process of law*)
- d.) Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar
- e.) Berfungsi organ independen yang saling mengendalikan
- f.) Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak
- g.) Tersediannya upaya peradilan Tata usaha negara

³¹ Mahfud M.D., Perdebatan Hukum tata negara pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers 2010 hlm 8.

³² Sumali. 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*. UMM Press. 2003 Malang hlm 12

³³ *Ibid* hlm 10

³⁴ Jimly Assidqie. *op.cit.* hlm 309-310

Dalam Praktek penggunaan kekuasaan ini tidak jarang menimbulkan masalah yakni berupa tindakan sewenang-wenang (*a bus de droit /willikeur*) penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvair*) kekeliruan menafsirkan hukum (*ermessen unterschreing*),serta melanggar hukum dengan sengaja (*ermessen uberschetiung*). yang dampak jutsru merugikan Masyarakat akibat tidak sedikit warga Negara mulai resah mengeluhkan Intervensi Negara yang sifat Kontra produktif, dan tidak jarang bertindak refresif dan desktruktif. demikian dalam konsep Negara Hukum di Indonesia memuat unsur yang sangat esensial yaitu Kekuasaan Pemerintah di batasi demi terpelihara kebebasan dan hak dasar Warga Negara.dan merupakan satu subsistem untuk mewujudkan cita hukum Pancasila,yang memberikan Fondasi hukum yang kuat bagi Kepresidenan sebagai kepala Pemerintahan dan kepala Negara dalam pelaksanaan kewenangannya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Karean konsep hukum yang hendak diwujudkan di Indonesia adalah sistem hukum Pancasila yang berdasarkan atas kepentingan Rakyat Semata.³⁵

B.Sistem Pemerintahan

B.1.Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan menurut Jimmly merupakan suatu sistem hubungan antara lembaga negara.³⁶Sistem Pemerinatahan berkaitan dengan pengertian dengan (*regeringsdaad*)penyelenggraan pemerintahan eksutif dalam hubungannya dengan fungsi legislative,sistem pemerintahan dapat di artikan sebagai struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legeslatif,eksekutif dan yudikatif

³⁵ *Ibid*

³⁶ Jimly Assiddiqie.*penguatan sistem pemerintahan.Op.cit* hlm 57

yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain .dengan demikian sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lainnya.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan hukum, politik, pertahanan, ekonomi, sehingga menjadi sistem pemerintahan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Dalam arti sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.³⁷ berkaitan dengan sistem pemerintahan pada umumnya dibedakan kedalam dua sistem yaitu : sistem presidensiil dan parlementer, di luar kedua sistem tersebut merupakan sistem “campuran” atau kuasi parlementer atau kuasi presidensial, ada juga yang menyebutkan sistem referendum.³⁸

Sistem pemerintahan yang di kenal secara garis besar di dunia dapat di bedakan dalam tiga macam yaitu :

a.) Sistem Pemerintahan Presidensial (*Presidensial system*)

Pada Hakikatnya Sistem Presidensial meletakkan jabatan Presiden tidak hanya sebagai pusat kekuasaan *eksekutif* tetapi juga pusat kekuasaan Negara. yang

³⁷ Sulardi. *menuju sistem pemerintahan Presidensiil murni*, setara press, Malang 2012 hlm 46

³⁸ Mahfud MD, *Dasar dan struktural ketatatnegeraan Indonesia*, PT Mahastya. hlm 84

artinya Presiden sebagai kepala *eksekutif* (*Chief of executive*) dan juga kepala Negara (*Chief of state*) kedua jabatan tersebut merupakan cabang kekuasaan *eksekutif*.

oleh C.F Strong Kedua jabatan ini di bedakan antara pengertian nominal eksekutif dan real eksekutif.

Menurut *Rode Hoge* Sistem Pemerintahan Presidensial Terdiri dari 2 Unsur yaitu :

- a).Presiden yang di pilih oleh Rakyat Menjalankan Pemerintahan dan mengangkat Pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- b.)Masa jabatan yang tetap dan dewan perwakilan keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).

Menurut Mac Iver Pemerintahan merupakan suatu ilmu mengenai cara bagaimana orang-orang dapat di perintah dan di kendalikan.sedangkan J.S.T Simorangkir mendefinisikan Pemerintahan merupakan sebuah alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah.

Menurut M. Kusnardi, pemerintahan dapat diartikan sebagai urusan-urusan yang dilakukan oleh sebuah negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat atau pun warga yang dimilikinya dengan jalan memenuhi kepentingan rakyatnya serta menjalankan dan melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara baik dan benar.³⁹

B.2.Sistem Pemerinatahan Indonesia

Menurut Jimmly Assiddiqie Sebelum adanya Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,Sistem Pemerintahan yang di anut tidak sepenuhnya sistem presidensial.jika di lihat hubungan antara dewan Perwakilan Rakyat sebagai parlemen dengan presiden yang sejajar(*neben*)serta adanya masa jabaatan Presiden yang di tentukan (*fix term*).memang menunjukan ciri Sistem

³⁹ Inu Kencana Syafiie dkk.*sistem pemerintahan Indonesia*.2012.Renika cipta.Jakarta Timur hlm 10-11

Presidensi. Namun jika dilihat dari keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat memberhentikan Presiden, maka sistem tersebut memiliki ciri-ciri sistem parlementer.⁴⁰ Pola pengawasan dan pertanggung jawaban yang terdapat dalam sistem Presidensial terdapat mekanisme *Check and balance* antara eksekutif dan legislatif, legislatif sebagai lembaga penyusun perundang-undangan namun memerlukan pelaksanaan oleh eksekutif. Akan tetapi eksekutif dapat mem-veto atau menolak kebijakan legislatif sebagai penyusun perundang-undangan. Sedangkan legislatif juga memiliki hak untuk meng-*Impeach* eksekutif. Presiden sebagai pimpinan eksekutif memiliki hak untuk mengangkat pejabat negara namun memerlukan persetujuan legislatif dan legislatif tidak bisa memberhentikan Presiden dan begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini Negara Republik Indonesia Menuju Negara Republik Indonesia yang lebih Efektif (*effective presidential*) di masa depan yang membentuk sebuah sistem presidensial Murni. Secara sederhana sistem pemerintahan menurut Dany Indrayana ada lima: yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan Parlementer, sistem kolejal, sistem monarki dan campuran.

Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial⁴¹. Dengan ciri-ciri sistem pemerintahan sebagai berikut :

- a). Presiden pemegang kekuasaan Pemerintahan eksekutif tunggal
- b). Dalam kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara itu terkandung pula status kepala negara (*head of state*) sehingga kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan eksekutif (*head of government*) menyatu secara tidak terpisah dalam jabatan Presiden.
- c). Presiden Tidak diangkat dan dipilih oleh lembaga Perwakilan Rakyat

⁴⁰ Jimmly Assidiqie *pokok-pokok hukum tata negara loc.cit* hlm.108

⁴¹ Denny Indrayana, 2008. *Negara antara ada dan tiada, Kompas media Nusantara*, Jakarta 2008. Hlm 192

d.).Presiden Tidak bertanggung jawab Kepada lembaga Perwakilan Rakyat,sehingga Tidak dapat di jatuhkan oleh parlemen karena alasan Politik.
e.).Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatan melalui Prosedur yang dikenal dengan”*Impeachment*”karena alasan pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945.⁴²

namun dalam sistem Presidensial dapat pula muncul kegagalan yang di sebabkan oleh munculnya demokrasi *caesarisme* (eksekutif berkuasa dan legeslatif lemah) militer memperoleh kekuasaan politik,dan eksekutif mampu mengatur suara di parlemen.⁴³ dan ada yang di sebut dengan Sistem Pemerinatahn Parleментар (*parliamentary system*);

Sistem parlementer jabatan kepala negara (*head of state*)dan kepala pemerintahan (*head of government*)itu dibedakan dan dipisah satu sama lain,pada hakikatnya kepala negara dan kepala pemerintahan itu dalam sistem parlementer merupakan cabang kekuasaan eksekutif.

Menurut C.F Strong jabatan eksekutif pengertian nominal executive dan real executive sedangkan kepala pemerintahan disebut *real excecutive*.⁴⁴

Dalam hubungan kelembagaan sistem parlementer terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan namun tidak ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif,baik eksekutif maupun legeslatif berada di parlemen,jajaran eksekutif adalah anggota parlemen sehingga di sebut sistem parlemen.kepala pemerintahan adalah pimpinanan kekuatan mayoritas di parlemen,se sedangkan kepala negara hanya memiliki kekuasaan simbolik di luar eksekutif dan legislative. sebutan kepala Pemerintahan yakni perdana menteri

⁴² Jimmly Assidique,.*Op.cit* hlm 311-314

⁴³ Nukto Afiwe.*Op.cit* hlm 45

⁴⁴ Jimmly Assiddiqie.*op.cit*.hlm 278

atau pimer minister, sebutan kepala Negara yanki Presiden, raja, ratu, gubernur. dalam sistem parlementer terdapat meknisme pemerintah oposisi dalam legilsatif partai kekuatan kedua di parlemen membentuk oposisi, pimipinan partai menjadi ketua oposisi sehingga kebijakan pemerintah di perdebarkan di parlemen dengan pihak oposisi sesuai dengan lingkup masing-masing (misalnya perdana menteri dengan pimpinan oposisi). legelsatif dapat membubarkan pemerintah dengan mosi tidak percaya dan mendesak pemu untuk memilih anggota parlemen baru.⁴⁵

Sistem campuran (*mixed system atau hybrid system*) Sementara itu dalam sistem campuran unsur-unsur kedua sistem parlementer itu tercampur dimana ciri-ciri kedua sitem tersebut di atas sama-sama di anut oleh Karen itu kedua sistem presidensil dan sistem pemerintahan parlementer tersebut pada pokoknya di bedakan atas dasar kriteria :

- a.) Ada tidaknya perbedaan antara *real axcecutive* dan *nominal executive* dalam penyelengraan pemerintahan negara.
- b.) Ada tidaknya hubungan pertanggung jawaban antara cabang eksekutif dengan cabang legislatif. dan juga ada yang di sebut dengan sistem campuran dalam sistem campuran atau gabungan dari dua sistem tersebut yang mengambil sebagian mekanisme presidensialisme dan sebagian mekanisme parlementarianisme.⁴⁶

Namun di lihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem pemerintahan campuran. karena dalam sistem campuran dimana ciri-ciri kedua sistem tersebut sama-sama di anut yang pada pokonya di bedakan atas dasar kriteria ada tidaknya pembedaan antara *real executive* dan *nominal executive*

⁴⁵ *Op.cit* sulardi *sistem presidensiil murni*. *Op.cit*. hlm 53

⁴⁶ *ibid* hlm.54

dalam penyelenggaraan negara dan ada tidaknya pertanggung jawaban antara *executive dengan legeslatif*. dengan adanya Undang-Undang lembaga Kepresidenan ini akan memberikan penyempurnaan desain sistem pemerintahan Indonesia menuju sistem Presidensial lebih efektif.

C.Konsepsi Teori Kewenangan

C.1.Pengertian Kewenangan dan Wewenang

Secara konseptual istilah wewenang atau Kewenangan sering di seajarkan dengan istilah belanda “*bevoegdied*”(wewenang atau berkuasa) wewenang merupakan bagian yang sangat penting karean pemerintah dapat menjalankan wewenangnya berdasarkan kewenangan undang-undang juga dapat di artikan Kewenangan adalah kemampuan bertindak yang di berikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan Hukum.⁴⁷

Adapun definisi kewenangan dari para Ahli hukum dan kamus lainnya peneliti uraikan di bawah ini sebagai berikut:

Menurut kamus besar bahasa indonesia,kata wewenangan disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴⁸

Istilah wewenang atau kewenangan diejajarkan dengan *authority*”dalam Bahasa inggris dan “*behoegdheid*” dalam Bahasa belanda.*Authority* dalam Black’s lawa Dictionary di artikan sebagai *legal Power a right to command or to*

⁴⁷ Ridwan HR.”*Hukum Adminsitasi Negara*” Raja Grafindo Persada.2008.Jakarta.hlm 102

⁴⁸Kamal Hijaz”*efektivitas penyelenggraan Kewenangan dalam sistem Pemerinatahan Daerah*”Pustaka Refleksi.Makasar.2010.hlm 35

*command or to act the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*⁴⁹

(kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah untuk bertindak pejabat public untuk mematuhi hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁵⁰

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kewenangan. Kewenangan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁵¹

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁵²

⁴⁹ Nur Basuki winamo "Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta. 2008. hlm 65

⁵⁰ Ridwan HR. *Loc. cit.* hlm. 71

⁵¹ *Op. cit.* hlm 35

⁵² *Ibid.* Ridwan HR. hlm 105

Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁵³

Menurut Pramujdi Atmosudirjo bahwa kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau wewenang terhadap suatu bidang pemerintahan dalam bidang urusan tertentu.⁵⁴

Dari berbagai definisi kewenangan sebagaimana para ahli hukum menjelaskan definisi kewenangan, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan memiliki arti yang formal, sedangkan wewenang merupakan satu spesifikasi dengan kewenangan yang sama-sama mempunyai konsekuensi hukum dalam pengambilan keputusan.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu : pengaruh, dasar hukum dan kompromitas Hukum.

- a.) Komponen Pengaruh adalah bahwa Penggunaan wewenang di maksud untuk mengendalikan Perilaku subjek Hukum
- b.) Komponen dasar Hukum bahwa wewenang itu selalau dapat di tunjuk dasar hukumnya.
- c.) Komponen Kompromitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu).⁵⁵

Sejalan dengan Negara Hukum bahwa pada Prinsipnya wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan. dalam kepustakaan administrasi terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi dan juga mandat yang di tempatkan dengan cara tersendiri Untuk Memperoleh kewenangan⁵⁶

⁵³ *Ibid.* Ridwan HR.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Op.cit.* Nur Basuki winarno.hlm 66

⁵⁶ *Ibid.* hlm 70

Setiap perbuatan pemerintah diisyratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa adanya kewenangan yang sah maka pejabat pemerintah atau badan tata usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan sah bila dilihat dari sumber lahirnya atau diperoleh. Ada tiga kategori: Atribusi, Delegasi dan mandat sebagaimana penjelasan di bawah ini.⁵⁷

C.2 Sumber kewenangan dan wewenang

a.) Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada Organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan itu sifatnya melekat terhadap pejabat yang dituju. Contohnya Dewan dapat membentuk Undang-Undang untuk disetujui bersama dengan Presiden.

b.) Delegasi ialah : pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ satu kepada organ Pemerintah yang lain, atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan, dan sifat tanggung jawabnya berada pada penerima delegasi atau delegataris.

c.) Mandat ialah : suatu pelimpahan kewenangan kepada bawahan, pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat. Sifat tanggung jawab tetap pada pemberi mandat hal ini dapat dilihat dari atas nama pemberi mandat.⁵⁸

⁵⁷ Ibid. hlm 71

⁵⁸ Azmi Fendri "Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah daerah" Rajawali Pers. 2003., Jakarta hlm 35

Dengan demikian ada perbedaan mendasar antara satu sama lain antara kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Namun dalam hal pelaksanaan tugas Presiden dan wakil Presiden kerap menjadi sorotan dalam masyarakat atau akademisi bentuk pelimpahan kewenangan Presiden kepada wakil Presiden

Menurut Solly Lubis menyatakan bahwa Hubungan dengan Presiden dan wakil Presiden sebagai penyelenggaraan Pemerintah atau kepala pemerintahan bentuk pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh Presiden terhadap wakil Presiden adalah dalam pengertian Pelimpahan kewenangan bukan pembagian kekuasaan” kewenangan yang bersifat mandat. sejarah perjalanan konstitusi tidak menganut Prinsip pembagaaian tugas dan tanggung jawab antara presiden dengan wakil Presiden karena Presiden dan wakil Presiden merupakan satu kesatuan sistem yang di sebut lembaga Kepresidenan dan wewenang wakil Presiden tergantung kepada Presiden sejauh mana wewenang itu akan di limpahkan kepada wakil Presiden,⁵⁹

Wakil Presiden dalam Praktek sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan “pembantu” Presiden dalam menjalankan kewenangannya, dengan adanya pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan merupakan bagian untuk Presiden dan wakil Presiden bagian dalam menegaskan suatu pola tata hubungan pelimpahan kewenangan dan sebagai upaya menghindari *konflik of interest* baik Presiden terhadap wakil Presiden maupun para kabinet kerja kepresidenan.

⁵⁹Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang bersih dan bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV (Bandung, Universitas Parahyangan, 2002), hlm 20

D.Teori Herarki Peraturan Perundang-Undangan

D.1.Pengertian Herarki Peraturan Perundang-Undangan

Menurut S.J Fockema Andrea Pengertian atau Istilah Perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda yaitu :

- 1.)Perundangan merupakan proses pembentukan /proses membuat peraturan perundang-undangan negara baik di tingkat pusat,maupun di tingkat daerah.
- 2.) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁶⁰

Hal ini berarti dalam membahas perundang-undangan selain mempersoalkan Proses pembentukan juga melihat hakikat segala peraturan negara yang di hasilakn melalui proses pembentukan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.⁶¹senada dengan pengertian di atas Mari farida Indarti soeprato mendefinisikan peraturan perundang-undangan dalam dua pengertian yaitu:

- 1.)Sebagai proses pembentukan (proses membentuk) peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- 2.)Sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menurut M Solly Lubis membedakan dua istilah yaitu : peraturan perundang-undangan dan peraturan negara.peraturan perundangan di artikan sebagai peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara,pengaturan negara itu sendiri ialah peraturan tertulis yang di terbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu.⁶²

⁶⁰ Has Natabaya”Sistem Ilmu Perundang-Undangan”2008.Tata Nusa.Bandung hlm 45

⁶¹ I gede Panja Astwaja dan suprin Na’a.Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia.PT Alumni,Bandung.hlm 14

⁶² Ibid.hlm 15

Menurut A Hamid S.Attamimi memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Semua peraturan hukum yang berlaku umum dan mengikat rakyat,biasanya di sertai sanksi yang di buat oleh lembaga-lembaga tertentu disertai sanksi yang di buat oleh lembaga-lembaga tertentu dan menurut Prosedur tertentu pula.

Pada bagian lain juga ia menjelaskan peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi dari undang-undang dalam penjelasan tentang hakikatnya peraturan perundang-undang⁶³

Menurut Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa suatu peraturan perundang-undang memiliki ciri :

- a.) bersifat umum dan komprehensif sehingga merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus yang terbatas.
- b.) bersifat universal ia di ciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya,oleh Karen itu ia tidak dapat di rumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja
- c.) memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri sendiri,dalam setiap peraturan lazimnya mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.⁶⁴

Pengertian,ciri dan batasan juga terdapat asas-asas peraturan perundang-undangan.

Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni nilai-nilai yang di jadikan pedoman dalam penentuan norma atau isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang di inginkan dengan penggunaan metode yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah di tentukan.

Menurut Logemen setiap peraturan hukum pada hakikatnya di pengaruhi oleh dua unsur penting yakni :

⁶³ Ibid.hlm 18

⁶⁴ Viktor Imanuel.*Ilmu Perundang-Undang*.Sulu Media Press.Bandung.hlm 10

a.) Unsur riil karena sifat yang konkret bersumber dari lingkungan tempat manusia hidup seperti tradisi atau sifat-sifat yang di bawah manusia sejak lahir dengan perbedaan jenisnya.

b.) Unsur idiil Karena sifatnya yang abstrak bersumber pada dirinya manusia itu sendiri yang berupa akal /pikiran dan perasaan.

Dari pandangan logemen setidaknya ada 3 fungsi asas yaitu :

a.) Sebagai Patokan dalam pembentukan dan pengujian norma hukum

b.) Untuk memudahkan kedekatan pemahaman terhadap hukum

c.) Sebagai cermin dari peradaban masyarakat atau bangsa tertentu dalam memandang perilaku.⁶⁵

Teori Peraturan Perundang-undangan (*Gezetsgebungstheorie*) Pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu pengetahuan perundang-undangan (*gezetsgebugswissenschaft*), yang berupaya mencari kejelasan makna atau pengertian-pengertian hukum dan peraturan perundang-undangan secara kognitif.⁶⁶ Salah satu Intelektual Mazhab Hukum murni Yang pemikirannya tentang *Grundnorm* dan hierarki Perundang-undangan di berbagai negara yakni Hans Kelsen mengategorikan hukum sebagai norma yang dinamik (*nomodynamic*.)

Menurut konsep ini hukum adalah sesuatu yang dibuat melalui suatu prosedur tertentu dan segala sesuatu yang di buat menurut cara ini adalah hukum. dalam kaitannya dengan konstitusi, hukum di kosepsikan sebagai suatu yang terjadi menurut cara yang ditentukan konstitusi bagi pembentuk hukum. lebih jauh Hans Kelsen mengungkapkan tentang karakter dinamis hukum yaitu :⁶⁷

⁶⁵ Muctar Rosyidi. *Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Gramedia. Jakarta. hlm 10

⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁷ *Ibid*. hlm 13

“hukum mengatur pembentukan sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat suatu norma hukum lainnya dan juga sampai derajat tertentu menentukan isi norma lainnya tersebut. hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma lain dengan norma lainnya di gambarkan sebagai hubungan antara superordinasi dan subordinasi. kesatuan norma ini di tunjukan oleh fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah di tentukan oleh norma lainnya yang lebih tinggi dan bahwa regresussus ini di akhiri oleh suatu norma dasar, oleh karena menjadi dasar tertinggi dari validasi keseluruhan tata hukum, membentuk kesatuan tata hukum.”⁶⁸ menurut Kelsen kendati konstitusi merupakan puncak tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan namun tidak tertutup kemungkinan terjadi konflik atau penyimpangan peraturan dari konstitusi. mengenai hal ini, kelsen mengemukakan Prinsip *Lex posteriori derogate priopri*. Dan Prinsip *desuetude* untuk mengatasi terjadinya konflik hukum.⁶⁹

Teori kelsen ini kemudian di kembangkan lebih lanjut oleh salah satu muridnya yakni hans Nawasky. di dalam bukunya berjudul *Allegemeine Rechtshlehre*. nawasky menyatakan bahwa suatu norma hukum di negara manapun tidak saja selalu berlapis dan berjenjang, diatasnya. sedangkan norma yang paling tinggi berlaku dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi. tetapi juga norma hukum itu di kelompokkan. kelompok norma hukum itu ialah :

⁶⁸ Maria Farida Indarti Suprpto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta. hlm 25

⁶⁹ Sumali. *Op.cit* (I) hlm.21

- a.) Norma hukum Fundamental Negara (*statsfundamentalnorm*).
- b.) Aturan dasar atau aturan pokok-pokok negara (*staatsgrundgesetz*)
- c.) Undang-Undang formal (*formal Gesetz*)
- d.) Aturan pelaksanaan dan aturan otonom.

Teori ini yang di kembangkan dari kelsen tersebut selanjuta oleh Nawasky dinamai *Die Theorie vom stufenordnung der rechtsnorm*.⁷⁰

D.2 Peraturan Herarki Perundang-undangan di Indonesia

Perkembangan peraturan perundang-undangan di indoensia sejak zaman Hindia Belanda sampai saat ini terus megalami perubahan namun penulis membatasi cakupan pembahasan sejarah perjalanan peraturan perundang-undangan di indoensia,dengan melihat dan mengguakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.⁷¹

Sistem Hukum Nasional yang utuh saling berkaitan satu dengan yang lainnya.sistem peraturan perundang-undangan ini tersusun secara heraraki sesuai dengan teori mengenai jenjang norma hukum yang di kemukakan oleh hens kelsen.dalam sistem hukum Indonesia Peraturan perundang-undangan juga tersusun berlapis-lapis dan berjenjang sebagaimana telah di atur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut :

- a.) Undang-undang Dasar 1945
- b.) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c.) Undang-Undang /Peraturan Pengganti Undang-Undang
- d.)Peraturan Pemerintah
- e.) Peraturan Presiden
- f.) Peraturan daerah Provinsi

⁷⁰*Ibid*.hlm 23

⁷¹ Ahmad Ali. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence)* Jakarta,2009.hlm 60

g.) Peraturan daerah kabupaten⁷²

Dengan demikian selaras dengan penjelasan penulis di atas tentang batasan dan ciri serta unsur dan sifat dari peraturan perundang-undangan Indonesia

Menurut Attamimi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dalam pembentukannya mengandung nilai dan asas sebagai berikut :

a.) Asas-asas formal meliputi :

- 1.) Asas tujuan yang jelas
- 2.) Asas perlunya pengaturan
- 3.) Asas organ atau lembaga yang tepat
- 4.) Asas materi muatan yang tepat
- 5.) Asas dapat di laksanakan

b.) Asas-asas materil meliputi :

- 1.) Asas sesuai cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara
- 2.) Asas sesuai dengan hukum Dasar negara
- 3.) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara dan negara berdasarkan atas hukum
- 4.) Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional.⁷³

Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam gagasan pembentukan Undang-Undang lembaga kepresidenan mengalir nilai-nilai Pancasila. nilai inilah yang akan memberikan arah gagasan

⁷² Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

⁷³ Ahmad Ali. *Loc.cit.* hlm 85

pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan sebagaimana yang di maksudkan dalam teori herarki norma yang di kemukakan oleh hens kelsen dan beberapa pakar hukum lainnya bahwa suatu norma dalam konstitusi tidak menutup kemungkina akan terjadi konflik dalam konstitusi yang di akibatkan oleh banyaknya pengaturan norma-norma tersebar secara parsial.”⁷⁴

Pada hakikatnya Pancasila merupakan nilai dasar bangsa Indonesia sumber dari segala sumber hukum yang merupakan nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat, diharapkan dalam gagasan pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan, nilai-nilai Pancasila di harapkan mampu dijadikan norma dasar (*grenorm*) sebagai petunjuk untuk mengitegral peraturan-peraturan lainnya sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.

E. Konsepsi Lembaga Kepresidenan

E.1 Konsepsi Lembaga Kepresidenan

“Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintah yang tugas-tugas eksekutifnya di jalankan dan di pertanggung jawabkan oleh Presiden dalam menjalankan Tugasnya Presiden di bantu oleh wakil Presiden dan Para Menteri.”

Teori pemisahan kekuasaan dan didorong oleh keinginan yang kuat untuk menentang sistem parlementer yang di pandang sebagai budaya Kolonial Inggris. karena karakteristik Pertama sistem Presiensial adalah badan Perwakilan Tidak memiliki *supremacy of parliament*.⁷⁵ karena lembaga tersebut

⁷⁴ Maria farida *loc.cit*, hlm 35

⁷⁵ Jimly Assiddiqie. “format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 194 “FH-UII.2004 Yogyakarta hlm 59

bukan lembaga pemegang kekuasaan Negara. dalam sistem Presidensial, kabinet tidak bertanggung jawab secara kolektif, tetapi tiap-tiap menteri bertanggungjawab secara individual kepada presiden. sistem presidensial anggota badan legislatif tidak dapat merangkap Jabatan cabang eksekutif, dan sebaliknya, Pejabat eksekutif tidak boleh merangkap menjadi anggota badan legislatif.⁷⁶

Pada dasarnya Presiden dan wakil Presiden secara bersama-sama di sebut sebagai Lembaga Kepresidenan yang memiliki sejarah hampir sama tuannya dengan Perjalanan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁷

Menurut C.F Strong. Istilah Eksekutif acapkali di gunakan secara kabur, kadang menunjukan pada jabatan Presiden atau Perdana menteri, namun kadang di pakai sebagai seluruh lembaga atau organisasi pelayanan Publik, sipil, dan militer. bagi Strong kekuasaan pengertian eksekutif adalah Kepala Pemerintahan bersama-sama dengan Para menteri yang umumnya di sebut kabinet. atau dalam kalimat berbeda ia mengatakan “ *That body In the state to which the constitution gives authority to execute the law when it has received the sanction of the legislature.* sementara itu Wansely Wynes dalam karyanya *Legeslative Executive and judicial powers in Australia.* kekuasaan eksekutif di definisikan sebagai kekuasaan dalam negara yang melaksanakan Undang-Undang oleh kepala Pemerintah Negara, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata-tertib dan keamanan, baik di dalam

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Patrialis Akbar. *hubungan lembaga kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan hak veto* hlm 20. Alumni Pres. Jakarta Pusat hlm 5

maupun di luar negeri. adapun kekuasaan eksekutif. ismail suny mendefinisikan kekuasaan eksekutif antara lain :

- a.) Kekuasaan Administratif yaitu pelaksanaan Undang-Undang dan Pelaksanaan dan politik administrasi
- b.) kekuasaan legislatif yaitu memajukan Rancangan Undang-Undang dan mengesahkan Undang-Undang.
- c.) Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk memberi grasi dan amnesti
- d.) kekuasaan militer yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan Pertahanan.⁷⁸

sedangkan Ismail Suny mengartikan Lembaga kepresidenan diartikan sebagai institusi atau organisasi Jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisi dua Jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden.⁷⁹

Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sistem Pemerintah Presidensial, Presiden dan wakil Presiden merupakan satu Institusi penyelenggaraan kekuasaan Eksekutif Negara yang tertinggi.⁸⁰

Lembaga Kepresidenan sebagai benteng terakhir pencari keadilan masyarakat dan warga Negaranya. lembaga yang hampir sama umurnya dengan perjalanan kemerdekaan Negara Indonesia. dengan pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan merupakan suatu upaya menguatkan Presiden dan wakil Presiden.

⁷⁸ .Loc Cit.Sumali., hlm 39

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm.59

⁸⁰ *Ibid*